



PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, DANA ALOKASI KHUSUS DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ida Ayu Putu Mega Rosita¹ Made Kembar Sri Budhi²

Article history:

Submitted: 2 Agustus 2022

Revised: 16 Agustus 2022

Accepted: 23 Agustus 2022

Keywords:

Economic growth;

Public welfare;

Government spending;

DAK;

Investation;

Kata Kunci:

Pertumbuhan ekonomi;

Kesejahteraan masyarakat;

Pengeluaran pemerintah;

DAK;

Investasi;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Udayana, Bali,

Indonesia

Email: Ayum2175@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of government spending, special allocation funds and investment on economic growth and community welfare in the districts/cities of the province of Bali. The data used are data from 2011-2020. The data source in this study is secondary data, which was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Bali Province. The analytical tool used in this research is path analysis using Partial Least Square (PLS) and SPSS software. The results of this study indicate that government spending has a positive and significant effect on economic growth. DAK has a negative and insignificant effect on economic growth. Investment has a positive and significant effect on economic growth. government spending has a positive and significant effect on the welfare of the community DAK has a positive and significant effect on the welfare of the community. Investment has no significant effect on people's welfare. Economic growth has a positive and significant impact on people's welfare. There is a significant positive indirect effect of government spending, DAK and investment on people's welfare through economic growth in districts/cities in Bali Province

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, dana alokasi khusus dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota provinsi Bali. Data yang digunakan yaitu data dari Tahun 2011- 2020. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan *soft ware Partial Least Square (PLS)* dan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah, DAK dan investasi secara positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi adalah salah satu dari berbagai upaya yang ada, yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam menuju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga setiap perencanaan dalam pembangunan akan mempertimbangkan semua potensi ekonomi. Perencanaan pembangunan dipandang sebagai pedoman atau panutan agar dapat menghasilkan pembangunan ke arah yang positif atau dengan kata lain dapat dijadikan sebuah jembatan dalam perekonomian apabila pemerintah mengharapkan keberhasilan yang lebih.

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan caramenentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Pengeluaran pemerintah juga diperlukan untuk menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja. Pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang diimplementasikan pada pengeluaran belanja rutin.

Kenaikan pengeluaran pemerintah yang direncanakan akan menyebabkan penambahan permintaan agregat, dimana permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat. Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja karena variabel ini diwujudkan pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengklasifikasian belanja langsung dan tidak langsung ini digunakan dalam sistem penganggaran pemerintah baik pusat maupun daerah, yaitu sejak penerapan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan yang lama sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan. Kemudian, berdasarkan PP No. 58 Tahun 2008 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, klasifikasi belanja dalam sistem anggaran diperbaiki menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi, investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Sukirno (2010) investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia. Dalam perekonomian investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri atau asing di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam teori Investasi Harrod-Domar, pembentukan modal atau investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan adanya peranan pemerintah daerah memanfaatkan semua sumberdaya secara optimal (Fajrii, 2016). Peranan pemerintah dalam proses pembangunan di suatu daerah sangat penting (Nurudeen, 2010). Suatu daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam membiayai kegiatan operasionalnya (Janina, 2007). Untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan yang diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Transfer pemerintah pusat ke daerah melalui dana perimbangan diperkirakan akan mengakibatkan proporsi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam sehingga berdampak pada peningkatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat serta mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintah daerah itu sendiri (Hendra, 2016). Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu proses pertumbuhan sehingga pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Dalamagas, 2010). Malik et al. (2006), menyatakan bahwa strategi yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan desentralisasi fiskal. Hal senada juga disampaikan oleh Liu (2000), dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mengalami perubahan yang berarti melalui desentralisasi fiskal.

Dana alokasi khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Pemanfaatan dan penggunaan DAK menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah. Adanya pembangunan di daerah akan mampu mendorong Pemda agar meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia yang secara otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Jika DAK dapat dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana terjadi suatu perubahan kondisi perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan selama periode waktu tertentu. Dalam perekonomian modern, Pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki peranan penting dalam mengatur, mengawasi perekonomian, pemerintah juga mampu melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku ekonomi lainnya baik swasta maupun rumah tangga. Menurut Mirza (2012) pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap IPM, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan PDRB suatu wilayah dipengaruhi oleh produksi riil suatu wilayah.

Provinsi Bali merupakan daerah yang terkenal sebagai daerah tujuan pariwisata, sektor pariwisata menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Bali. Meskipun Bali dikenal sebagai

daerah pariwisata, namun dari 9 wilayah kabupaten dan kota hanya beberapa daerah saja yang menikmati hasil dari pariwisata Bali. Kecenderungan nilai PDRB tertinggi masih didominasi oleh Kabupaten Badung dan nilai terendah didominasi oleh Kabupaten Bangli. Terdapat selisih yang cukup besar antara nilai PDRB tertinggi dengan nilai PDRB terendah, hal ini menunjukkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cukup tinggi antara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Tabel 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2020 (Milyar)

KABUPATEN/ KOTA	TAHUN									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	5 999	6 365	6 727	7 134	7 576	8 027	8 452	8 924	9 420	8 952
Tabanan	9 895	10 500	11 178	11 908	12 644	13 420	14 141	14 949	15 784	14 815
Badung	22 322	24 027	25 666	27 458	29 170	31 157	33 052	35 275	37 325	31 159
Gianyar	11 682	12 508	13 361	14 269	15 168	16 125	17 005	18 027	19 038	17 442
Klungkung	3 798	4 036	4 280	4 536	4 813	5 115	5 387	5 682	5 990	5 610
Bangli	2 916	3 097	3 281	3 472	3 686	3 916	4 124	4 350	4 587	4 399
Karangasem	7 116	7 538	8 002	8 482	8 991	9 524	10 006	10 550	11 130	10 635
Buleleng	14 497	15 480	16 587	17 741	18 818	19 950	21 023	22 201	23 430	22 079
Denpasar	21 763	23 397	25 026	26 778	28 422	30 273	32 105	34 166	36 152	32 747
Provinsi Bali	99 991	106 951	114 103	121 787	129 126	137 296	144 933	154 072	162 694	147 549

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022

Kota Denpasar dan Kabupaten Badung mendominasi penerimaan PDRB tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan kedua wilayah ini saling berinteraksi dan memiliki daerah terluas serta jauh lebih berkembang dari pada wilayah lainnya, sehingga menjadikan kawasan ini memiliki kemajuan yang pesat. Selain itu pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan masih mengalami ketimpangan yang berakibat pada infrastruktur yang tidak merata, kurangnya kelengkapan infrastruktur yang meliputi pendidikan, kesehatan, transportasi serta sarana jalan dan air bersih dalam menunjang aktivitas ekonomi masih dirasa belum memadai di Bali Utara, sehingga menyebabkan banyak penduduk yang melakukan migrasi ke daerah Bali Selatan untuk mendapatkan atau mencari pekerjaan dan investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada Bali Selatan saja (Awandari, 2016).

Pertumbuhan ekonomi yang positif dan *sustainable* dapat dicapai dengan cara pemerintah melaksanakan otonomi daerah, dimana otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban pada daerah untuk menjalankan dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini memungkinkan terjadi percepatan dalam pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dibiayai oleh pendapatan daerah dimana sumber dari pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Suda Pratama (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berasal dari pengeluaran pemerintah yang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan potensi daerahnya masing-masing. Kebebasan pemerintah daerah dalam hal merencanakan keuangan daerah dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan untuk menunjang kemajuan daerah, pemerintah daerah berhak mengalokasikan anggaran belanja daerah yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diperlukan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Dana Alokasi Khusus dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat,

Ida Ayu Putu Mega Rosita dan Made Kembar Sri Budhi

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi nasional yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat. Pencapaian tersebut dapat terwujud melalui serangkaian usaha dan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya (Arsyad,2004). Pembangunan daerah sangat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada seperti mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendidikan yang sangat rendah serta ketimpangan lainnya antar kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Besar kecilnya proporsi anggaran untuk pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan perlu diperhatikan sebagai cerminan apakah pemerintah mempersiapkan kebijakan yang mendukung sisi pembangunan manusia atau tidak. Besarnya pembagian anggaran yang dialokasikan pada sektor pendidikan dan juga kesehatan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan daerah yang selanjutnya memberikan dampak terhadap kesejahteraan.

Penelitian Suciati (2015) menyebutkan bahwa, IPM adalah salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang menggambarkan kombinasi antara tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar hidup layak (dengan ukuran ketimpangan antar wilayah). Dalam penelitian ini digunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk ranking kesejahteraan suatu daerah. Informasi tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu masukan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa indikator tingkat kesejahteraan telah dikembangkan sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Saat ini penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari sisi ekonomi (daya beli), kesehatan maupun pendidikan (Nehen, 2012:81). Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari IPM yang meningkat yang terjadi di kabupaten dan kota Provinsi Bali.

Tabel 2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali Tahun 2011-2020

KABUPATEN/ KOTA	TAHUN									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	67,53	67,94	68,39	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35	72,36
Tabanan	71,35	71,69	72,31	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16	76,17
Badung	76,66	77,26	77,63	77,98	78,86	79,8	80,54	80,87	81,59	81,6
Gianyar	72,5	73,36	74	74,29	75,03	75,7	76,09	76,61	77,14	77,36
Klungkung	67,01	67,64	68,08	68,3	68,98	69,31	70,13	70,9	71,71	71,73
Bangli	63,87	64,53	65,47	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35	69,36
Karangasem	61,6	62,95	63,7	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34	67,35
Buleleng	67,73	68,29	68,83	69,19	70,65	70,65	71,11	71,7	72,3	72,55
Denpasar	29,77	80,45	81,32	81,65	82,24	82,24	83,01	83,3	83,68	83,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai IPM Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dari 70,87 poin pada tahun 2011 menjadi 75,5 poin pada tahun 2020. Namun tingkat IPM di antar daerah nya masih tidak merata atau mengalami ketimpangan, dimana kota Denpasar memiliki tingkat IPM paling tinggi diantara daerah lainnya. Masih terdapat 5 (lima) kabupaten yang hampir setiap tahun memiliki angka IPM di bawah rata-rata IPM Provinsi Bali, dan 5 (lima) kabupaten yang IPM nya dibawah IPM Provinsi Bali adalah Kabupaten Jembrana, Klungkung, Bangli, Karangasem dan Buleleng.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Walaupun kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan cenderung rendah dan masih terjadinya disparitas pendapatan antar daerah (Artana Yasa, 2015). Dengan terjadinya ketimpangan antar daerah yang terjadi maka perlu adanya pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan aspek lain yang meliputi serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Hal ini berarti pembangunan ekonomi sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu masyarakat mengalami kenaikan secara berkepanjangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Pengeluaran pemerintah, dana alokasi khusus dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. H2: Pengeluaran pemerintah, dana alokasi khusus, investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. H3: Pengeluaran pemerintah, dana alokasi khusus dan investasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data panel dan sumber data penelitian merupakan data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, karena tampak perbedaan pada nilai IPM pada lima kabupaten (Jembrana, Klungkung, Bangli, Karangasem dan Buleleng) dibandingkan dengan tiga kabupaten (Tabanan, Badung, Gianyar) dan Kota Denpasar, sehingga kesejahteraan masyarakat Bali belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata pada periode waktu 2011-2020. Obyek Penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah, Dana Alokasi Khusus, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di berbagai kabupaten/kota Provinsi Bali.

Variable terikat dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y_2). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah (X_1), Dana Alokasi Khusus (X_2) dan Investasi (X_3). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi pada

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Dana Alokasi Khusus dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat,

Ida Ayu Putu Mega Rosita dan Made Kembar Sri Budhi

kabupaten/kota di Provinsi Bali (Y_1). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi.

Dalam penelitian ini digunakan yaitu analisis jalur (*Path Analysis*) dengan *Partial Least Square PLS (component based SEM)*. Adapun persamaan yang digunakan dalam penelitian ini dua persamaan yakni:

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = b_4X_1 + b_5X_2 + b_6X_3 + b_7Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi

Y_2 = Kesejahteraan Masyarakat

X_1 = Pengeluaran Pemerintah

X_2 = Dana Alokasi Khusus

X_3 = Investasi

e_1, e_2 = Variabel pengganggu

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7$ = koefisien dari masing-masing variable

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3.
Hasil Uji *Path Analysis* (Struktur 1)

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	UnStandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
1	(Constant)	-8.535	1.431		-5.963	.000
	Pengeluaran Pemerintah	.836	.074	.710	11.329	.000
	DAK	-.049	.029	-.102	-1.721	.089
	Investasi	.096	.024	.258	3.959	.000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis jalur substruktur 1 seperti yang disajikan pada Tabel 5.3, maka dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,710 X_1 + (-0,102) X_2 + 0,258 X_3$$

Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (X_1) dan investasi (X_3), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1). Sedangkan variabel DAK (X_2) memiliki nilai signifikansi uji t lebih dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Berdasarkan hasil analisis jalur substruktur 2 seperti yang disajikan pada Tabel 5.4, maka dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut:

$$Y_2 = 0,3700 X_1 + 0,148 X_2 + 0,036 X_3 + 0,566 Y_1$$

Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah, DAK dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (X_1), DAK (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPM (Y_2) sedangkan investasi (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM (Y_2).

Tabel 4.
Hasil Uji Path Analysis (Struktur 2)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		UnStandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.811	1.836		-5.342	.000
	Pengeluaran Pemerintah	.371	.126	.300	2.948	.004
	DAK	.075	.031	.148	2.379	.020
	Investasi	.014	.028	.036	.495	.622
	Pertumbuhan Ekonomi	.594	.116	.566	5.103	.000

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 5.
Hasil Koefisien Determinasi

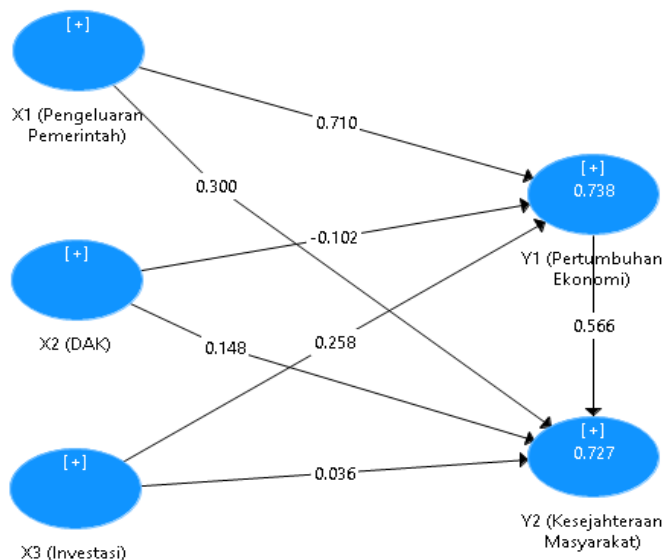
Struktur	Persamaan	R Square	Adjusted R Square
1	$Y_1 = 0,710 X_1 + (-0,102) X_2 + 0,258 X_3$	0,738	0,729
2	$Y_2 = 0,3700 X_1 + 0,148 X_2 + 0,036 X_3 + 0,566 Y_1$	0,727	0,714

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 5. menunjukkan pada persamaan struktur 1 (analisis jalur 1) besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,729 mempunyai arti bahwa sebesar 72,9% variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) dipengaruhi oleh variasi pengeluaran pemerintah (X_1), DAK (X_2) dan investasi (X_3) sedangkan sisanya sebesar 27,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Selanjutnya persamaan struktur 2 (analisis jalur 2) menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,714 mempunyai arti bahwa sebesar 71,4% variabel IPM (Y_2) dipengaruhi oleh variasi pengeluaran pemerintah (X_1), DAK (X_2), investasi (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1), sedangkan sisanya sebesar 28,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Nilai determinasi total dalam penelitian ini sebesar 0,9949 mempunyai arti bahwa sebesar 99,49% variabel Kesejahteraan Masyarakat dipengaruhi oleh variasi pengeluaran pemerintah, DAK, investasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 0,51% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.



Gambar 1.
Model Diagram Jalur Akhir

Tabel 6.
Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung serta Pengaruh Total Variabel Penelitian

Pengaruh Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pengaruh Total
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,710	-	0,710
$X_2 \rightarrow Y_1$	-0,102	-	-0,102
$X_3 \rightarrow Y_1$	0,258	-	0,258
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,300	$(0,710 \times 0,566) = 0,402$	0,702
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,148	$(-0,102 \times 0,566) = -0,058$	0,090
$X_3 \rightarrow Y_2$	0,036	$(0,258 \times 0,566) = 0,146$	0,182
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,566	-	0,566

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pertumbuhan ekonomi paling besar dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Selanjutnya kesejahteraan masyarakat atau IPM paling besar dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji F (*F test*) yang terdapat pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai F hitung pada persamaan struktur 1 (analisis jalur 1) sebesar 80,898 dengan nilai signifikansi *P value* 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa seluruh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah (X_1), DAK (X_2) dan investasi (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Hal ini berarti model dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut atau dengan kata lain model dapat digunakan untuk memproyeksikan karena hasil *goodness of fitnya* baik dengan nilai signifikansi *P value* 0,000.

Hasil uji F (*F test*) yang terdapat pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai F hitung pada persamaan struktur 2 (analisis jalur 2) sebesar 56,524 dengan nilai signifikansi *P value* 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa seluruh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah (X_1), DAK (X_2), investasi (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y_2). Hal ini berarti model dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut atau dengan kata lain model dapat digunakan untuk memproyeksikan karena hasil *goodness of fitnya* baik dengan nilai signifikansi *P value* 0,000.

Tabel 7.
Hasil Uji F

Struktur	Persamaan	F Statistik	Sig. Uji F
1	$Y_1 = 0,836 X_1 + (-0,049) X_2 + 0,096 X_3$	80,898	0,000
2	$Y_2 = 0,371 X_1 + 0,075 X_2 + 0,014 X_3 + 0,594 Y_1$	56,524	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai *Standardized Coefficients* sebesar 0,710. Nilai Signifikansi $0,000 < 0,050$ mengindikasikan bahwa Hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,089 dengan nilai *Standardized Coefficients* sebesar -0,102. Nilai Signifikansi $0,089 > 0,050$ mengindikasikan bahwa Hipotesis ditolak. Hasil ini mempunyai arti bahwa DAK tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai *Standardized Coefficients* sebesar 0,258. Nilai Signifikansi $0,000 < 0,050$ mengindikasikan bahwa Hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,004 dengan nilai *Standardized Coefficients* sebesar 0,300. Nilai Signifikansi $0,004 < 0,050$ mengindikasikan bahwa Hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh DAK terhadap kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,020 dengan nilai *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,148. Nilai Signifikansi $0,020 < 0,050$ mengindikasikan bahwa Hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis pengaruh investasi terhadap kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,622 dengan nilai *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,036. Nilai Signifikansi $0,622 > 0,050$ mengindikasikan bahwa Hipotesis ditolak. Hasil ini mempunyai arti bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,566. Nilai Signifikansi $0,000 < 0,050$ mengindikasikan bahwa Hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai *z* dari koefisien *ab* dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{b_1 b_5}{S b_1 b_5}$$

$$Z = \frac{(0,836)(0,594)}{0,140932}$$

$$Z = 3,52 \text{ dengan signifikansi } 0,0000031 \dots \dots \dots (2).$$

Oleh karena Z hitung sebesar $3,52 > 1,96$. Artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) merupakan variabel yang memediasi pengeluaran pemerintah (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) atau dengan kata lain pengeluaran pemerintah berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{b_2 b_5}{S b_2 b_5}$$

$$Z = \frac{(-0,049)(0,594)}{0,011542}$$

$$Z = 2,52 \text{ dengan signifikansi } 0,1085 \dots \dots \dots (3)$$

Oleh karena Z hitung sebesar $2,52 > 1,96$. Artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) merupakan variabel yang memediasi variabel DAK (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) atau dengan kata lain DAK berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

$$Z = \frac{b_3 b_5}{S b_3 b_5}$$

$$Z = \frac{(0,096)(0,594)}{0,025392}$$

$$Z = 2,24 \text{ dengan signifikansi } 0,0016 \dots \dots \dots (4)$$

Oleh karena Z hitung sebesar $2,24 > 1,96$. Artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) merupakan variabel yang memediasi investasi (X_3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) atau dengan kata lain investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama tahun 2011-2020. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang potensial untuk meningkatkan PDRB perkapita daerah. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2005) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerjadan memacu pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Zahari MS (2017) yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan ekonomi mempunyai efek positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Artinya dengan semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, karena pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, dan lain-lain. Artinya tidak boleh disalahgunakan/digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh (Widianto et al., 2016) hubungan tidak signifikan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena nilai dana alokasi khusus yang disalurkan oleh pemerintah pusat kurang dimaksimalkan untuk berbagai aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa investasi asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tiap negara. Karena semakin tinggi investasi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Besarnya investasi di setiap daerah akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada kesenjangan pendapatan masyarakat. Investasi yang tinggi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesenjangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

Hubungan positif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan Setyowati (2012) menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menandakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari besaran PDRBnya. Teori makro juga menyatakan bahwa distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya diarahkan lebih ke masyarakat miskin akan memiliki dampak yang lebih besar pada pembangunan manusia (Ranis, 2004). Hasil ini sesuai dengan penelitian Dewi dan Sutrisna (2014) yang menemukan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan penduduk dan seterusnya taraf hidup, akhirnya menjamin kemakmuran masyarakat, meningkatkan tahap kesehatan, keharmonian serta kesejahteraan yang berkelanjutan. Penelitian Lilis dan Yohana (2012) menyatakan bahwa Pertumbuhan PDB akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bagus, 2014). Meilen et al. (2014) menyatakan variabel DAK berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Ulfi dan Endrawati (2010) dana alokasi khusus memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian dari Yani Rizal (2021) memperoleh hasil bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena nilai dana alokasi khusus yang disalurkan oleh pemerintah pusat kurang dimaksimalkan untuk berbagai aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Siahaan (2016) yaitu DAK berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dikarenakan DAK merupakan dana yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional seperti untuk kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan investasi sarana dan prasarana, pembangunan jalan, pembangunan saluran irigasi dan lainnya. Alokasi DAK lebih diarahkan untuk tujuan pemerataan dan peningkatan kondisi infrastruktur fisik dan non-fisik yang menjadi prioritas nasional dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan kata lain, DAK dialokasikan bukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tetapi lebih kepada percepatan pembangunan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Hasil dari penelitian ini yaitu investasi tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga perlu ada variabel yang memediasi. Investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu dengan adanya investasi maka dibutuhkan tenaga kerja untuk merealisasikan investasi tersebut, misalnya investasi di perkebunan sawit akan langsung membutuhkan tenaga kerja untuk mengolah tanah, menanam, memelihara, serta tenaga untuk manajemennya (Sulistiawati, 2012). Apabila penyerapan tenaga kerja meningkat, maka akan dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pada laju pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mempunyai arti bahwa semakin tinggi investasi maka semakin tinggi pula pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mempunyai arti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Terdapat pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah, DAK dan investasi secara positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan adalah investasi hendaknya diarahkan pada kabupaten/kota di wilayah yang memiliki investasi fisik yang rendah seperti di Kabupaten Bangli, Karangasem, Jembrana, Klungkung dan Buleleng sehingga alokasi investasi tidak terpusat pada daerah tertentu seperti pada Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar dan Tabanan serta alokasi investasi juga diharapkan merata di semua sektor. Alokasi DAK agar dioptimalkan sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah diharapkan lebih intensif meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan menambah alokasi anggaran dari APBD untuk rehabilitasi gedung sekolah dan membangun fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran siswa dalam memperoleh pendidikan.

REFERENSI

- Amir, Ismayani., Zamhuri, Muhamad Y., Fattah, Sanusi. 2019. Analisis Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika* Vol.15 No. 3
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Aryanto, Rudi. 2011, Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*, 3(2), h:1-13
- Bassam A. Al Bassam. 2013. The Relationship Between Governance and Economic Growth During Times of Crisis. *European Journal of Sustainable Development*, 2,4, 1-18

- Dalamagas, Basil. 2010. Public Sector and Economic Growth : The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 2000,32, 277-288.
- Dewi, Putu Ayu Krisna dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 4 No. 1, tahun 2014. Universitas Udayana.
- Fajrii, Muhammad. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 9 No. 2
- Herni, Wijayanti, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *E-Jurnal Universitas Udayana*. 4[3] : 1164-1193
- Holz-Eakin, Douglas, Harvey S, and SchuyleyTilly. 1994. Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: Theory and Tests. *Journal of Urban Economic* 35: 159-174
- Janina Seputiene. 2007. The Reation Between Social Capital, Governnce and Economic Performance in Europe. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 8, No. 3, 131-138
- Kartikasari, Dwi. 2017. The Effect of Export, Import and Investment to Economic Growth of Riau Islands Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), p:663-667.
- Kaur, Masjinder. 2016. Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 8 No. 2
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol 5, no 2.
- Nurudeen, A., and Usman, A. 2010. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregate Analysis. *Business and Econmic Journal*. Vol.2010: BEJ-4: 1-11
- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics Finance*. Vol. 4(11):172-182
- Olatunji, O.C., O. Asaolu Taiwo and J.O. Adewoye. 2009. A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government : A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*. Vol.3(3): 54-60
- Pratama, Nengah Rai Narka Suda. 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* : 651-680
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Pretasi*. Juni 2012. Vo. 9, No.1 ISSN 1441-1497
- Siahaan, Lasma Melinda Br. 2016. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Di Sumatera Utara. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Suartha, Nyoman. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 10 No. 2
- Suciati, I Putu. 2015. Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2012. *Buletin Studi Ekonomi*. Vol 20 No. 2
- Suyana Utama, Made. 2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 3, No. 1, 29-50.
- Torki M, Al-Fawwaz. 2016. The Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Jordan (1980-2013). *International Business Research*. Vol.9 No.1:2016
- Valentin Romualda, Gaudiosa Bella Adur, Gaguk Apriyanto, Sutriswanto. 2019. Impact of pure regional income (PAD), general allocation funds (DAU) and special allocation funds(DAK) toward capital expenditures and its impact on economic growth(Case Study of Local Government in Malang Area). *International Journal of Academic Research and Development*, 4(6), p: 10-19.
- Widianto, A., Utami, E. U. S., & Nurmansyah, A. L. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Journal Research Accounting Politeknik Tegal*. 5 (2), 170-176.

Yani Rizal. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 5, No. 1 Maret 2021.

Zahari MS, M. 2017. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal of Economics and Business*, Vol.1 No.1 September 2017